

## **Menuju Kota Cerdas Berbasis Jasa dan Budaya yang Religius, Wali Kota Metro Resmikan Forum Konsultasi Publik RPJMD**

Pemerintah Kota Metro resmi memulai babak baru dalam pembangunan daerah dengan meresmikan Forum Konsultasi Publik (FKP) Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 yang berlangsung di Aula Pemerintah Kota Metro, Kamis (20/03/2026).

Wali Kota Metro, Bambang Iman Santoso, dalam sambutannya menekankan pentingnya RPJMD sebagai pedoman utama dalam membangun Kota Metro yang lebih maju, cerdas, dan tetap menjunjung tinggi nilai budaya serta religiusitas.

RPJMD ini, juga menurutnya bukan hanya sekadar dokumen perencanaan, tetapi juga menjadi komitmen kuat untuk selaras dengan kebijakan nasional, terutama Asta Cita Presiden yang telah tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029.



“RPJMD Kota Metro 2025-2029 mengusung visi Metro Kota Cerdas Berbasis Jasa dan Budaya yang Religius yang diwujudkan melalui 9 misi utama yaitu Peningkatan Mutu Pendidikan Berkarakter, Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan, Pelayanan Publik yang Lebih Cepat dan Akurat, Pengembangan Seni, Budaya, dan Pariwisata Berbasis Literasi, Meningkatkan Literasi Keagamaan, Pembangunan infrastruktur publik yang memadai.

Sebagai Wali Kota Metro, dirinya juga menginginkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Ekonomi dan Sosial, Pengembangan Teknologi Informasi Menuju Smart City dan Penataan Ruang dan Lingkungan Perkotaan yang Lebih Hijau dan Tertata.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Bambang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan RPJMD sehingga kebijakan yang dihasilkan adalah kebijakan yang inklusif dan berpihak pada rakyat.



Selain sembilan misi utama, Pemerintah Kota Metro juga merancang sejumlah program prioritas yang akan memberikan dampak langsung bagi masyarakat seperti Jalan Mulus, Bebas Banjir, Terang Benderang, Kenaikan Insentif bagi (RT, RW, LPM, serta Tenaga Keagamaan), Memberikan apresiasi dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan.

“Kami juga mempunyai misi Pendidikan Gratis hingga Perguruan Tinggi, BPJS Gratis bagi Masyarakat, Fasilitas WiFi Gratis di Ruang Publik, Dukungan Penuh untuk Petani dan Pelaku UMKM,” terangnya.

Dalam laporannya, Bambang juga menjelaskan bahwa RPJMD 2025-2029 akan melanjutkan berbagai capaian positif yang telah diraih dalam beberapa tahun terakhir, seperti peningkatan IPM, penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, serta pertumbuhan ekonomi yang positif.

“Dengan komitmen kuat dari Pemerintah Kota Metro dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat, RPJMD 2025-2029 diharapkan mampu menjadi pedoman yang efektif dalam mewujudkan cita-cita mulia untuk membangun Kota Metro yang cerdas, berbasis jasa dan budaya, serta religius. Sebuah kota yang maju, sejahtera, dan penuh makna bagi seluruh warganya,” ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota, M Rafieq Adi Pradana, menekankan pentingnya adanya sinkronisasi program prioritas antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah.

Ia mencontohkan keselarasan program prioritas pembangunan jalan dengan program Gubernur Lampung, khususnya dalam memastikan kelancaran jalan bagi pemudik selama Lebaran.

Tak sampai disitu, Rafieq juga mengingatkan pentingnya penanganan sampah, sesuai arahan pemerintah pusat dengan pengolahan yang baik sehingga sampah yang dihasilkan dapat memiliki nilai ekonomi dan energi.



“Terutama mungkin yang paling menjadi concern sekarang adalah masalah sampah bahkan di pemerintah pusat itu mereka sudah membuat BPSN (Badan Penanganan Sampah Nasional) itu di kepala langsung oleh menko infrastruktur bapak Agus Harimurti Yudhoyono. Perintahnya adalah salah satunya, bagaimana caranya ada penyisihan dana minimal 5%, maksimal 10% untuk pengelolaan sampah, bahkan kalau kita dari provinsi itu diarahkan 3%, “bebernya.

Menurutnya, Pemerintah Kota Metro juga perlu menyusun strategi baru untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan PAD Kota Metro, termasuk pengembangan sektor jasa dan ekonomi kreatif berbasis budaya lokal, serta digitalisasi layanan publik dan keuangan daerah untuk meningkatkan efisiensi dan pengawasan.

“Saya bersama pak Wali Kota Metro siap membantu kalau memang ada reformasi-reformasi birokrasi yang bisa dicanangkan oleh masing masing kepala OPD, karena prinsipnya kami berdua adalah apabila untuk pelayanan yang bersentuhan langsung masyarakat, maka diskusi selalu dibuka sehingga hal-hal yang baik itu bisa segera diimplementasikan, “bebernya.